

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Disabilitas menjadi salah satu isu kemanusiaan yang menjadi perhatian saat ini. Penyandang disabilitas yang sebelumnya menjadi objek yang dikenai suatu kebijakan, mulai merubah peran mereka untuk kemudian menjadi subjek dalam proses perumusan kebijakan. Tindakan afirmasi ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak mereka secara lebih legal dan mendapatkan perlakuan yang inklusif dari masyarakat. Lebih lanjut isu kemanusiaan yang menarik perhatian dunia internasional. PBB sebagai lembaga keamanan internasional telah mengeluarkan konvensi terkait hak penyandang disabilitas UNCRPD untuk menjadi dasar perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas dunia. Hal ini telah menunjukkan perkembangan dalam penanganan masalah terkait disabilitas dalam hubungan internasional. Negara-negara internasional mulai menjadikan isu disabilitas sebagai isu krusial yang harus mendapatkan perhatian yang lebih intens. Setiap negara yang telah meratifikasi UNCRPD memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai dan norma terkait perlindungan disabilitas, serta memasukannya kedalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Australia merupakan salah satu negara maju dengan perkembangan isu terkait kemanusiaan yang signifikan, termasuk didalamnya terkait penanganan terhadap disabilitas. Isu terkait disabilitas menjadi salah satu sektor kemanusiaan yang telah lama berkembang di Australia. Permasalahan mengenai penanganan disabilitas menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Australia, mengingat jumlah penyandang disabilitas yang terus meningkat. Kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas telah dimiliki oleh Australia sejak awal tahun 1990an. Pemerintah Australia memiliki dua landasan hukum yang kemudian menjadi *framework* utama dalam menangani permasalahan disabilitas yaitu *Disability Discrimination Act* dan *Disability Services Act*. Kedua landasan ini menjadi acuan dalam proses penyusunan kebijakan terkait disabilitas.

Pada tahap ini, inisiasi tentang berbagai kebijakan untuk layanan disabilitas berkembang pesat di Australia. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut masih mengalami kendala dan kekurangan terkait pendekatan kebijakan dan layanan

dalam implementasi kebijakan. Penyandang disabilitas Australia mengeluhkan terkait pendekatan institusional dan medis yang dilakukan terhadap mereka yang dinilai tidak ramah serta menempatkan mereka sebagai komunitas yang selalu membutuhkan bantuan, menjadi beban dan eksklusif. Lebih lanjut, proses pelayanan disabilitas di Australia masih berjalan masing-masing, dan disetiap negara bagian dan teritori memiliki penanganannya tersendiri mengenai disabilitas serta belum terkoordinasi dan komprehensif.

Oleh karenanya, Pemerintah Australia kemudian melakukan reformasi kebijakan terkait pemenuhan hak disabilitas. Dengan menggunakan nilai-nilai UNCRPD sebagai framework utama dalam penyusunan dan realisasi kebijakan. Pemerintah menginisiasi untuk dibuatnya kebijakan yang komprehensif, koordinatif dan ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui kebijakan *National Disability Strategy 2010-2020*, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan nasional jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan ini menggunakan pendekatan *person-centered*, konsep universal dan inklusi sosial (*disability-friendly*) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Dalam penanganan dan implementasi kebijakan, Pemerintah Australia (Federal) melakukan koordinasi dengan semua tingkatan pemerintah yaitu negara bagian, teritori, penyandang disabilitas dan NGO terkait, untuk bersama mengimplementasikan Kebijakan NDS. Dalam realisasinya, kebijakan NDS memiliki dua tahap implementasi yaitu *Laying Groundwork 2011-2014* dan *Driving Action 2015-2018*. Pada tahap pertama, Pemerintah Australia memfokuskan proses implementasi kepada pengenalan dan *mainstreaming* kebijakan kepada masyarakat Australia. Terdapat enam tujuan utama yang ingin dicapai untuk menciptakan suatu kebijakan yang ramah terhadap disabilitas melalui kebijakan tersebut. Seperti menciptakan komunitas yang inklusif dan dapat diakses dengan mudah, perlindungan hak, keadilan dan legislasi, keamanan ekonomi, dukungan personal dan komunitas, pendidikan dan keterampilan, serta kesehatan. Peningkatan dari keenam tujuan ini menjadi tolak ukur dan tujuan utama keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Kemudian, kebijakan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Australia dan terjadi peningkatan yang signifikan dalam proses realisasi enam tujuan NDS. Lebih lanjut, Pemerintah Australia juga memperkenalkan skema asuransi sosial terhadap masyarakat yaitu *National Disability Insurance Scheme (trial)* pada tiga negara bagian dan teritori, untuk menjamin pendanaan terhadap

penyandang disabilitas Australia. Setiap individu disabilitas memiliki akses terhadap NDIS dan berhak mendapatkan layanan disabilitas yang komprehensif dari pemerintah.

Pada tahap kedua, fokus utama implementasi kebijakan ialah transisi penuh Skema Asuransi Sosial (NDIS) dan peningkatan keterlibatan serta pelayanan terhadap penduduk pribumi Australia (*aboriginal and torres strait islander people*). Pemerintah Australia melakukan transisi NDIS untuk kemudian dapat diimplementasikan ke semua negara bagian dan teritori Australia dan mayoritas menyetujui hal tersebut. Peningkatan signifikan terjadi pada tahap ini dengan meningkatnya akses NDIS oleh partisipan disabilitas Australia. Dan mayoritas dari mereka memberikan respon yang baik dan menyatakan NDIS merupakan bentuk layanan yang ramah terhadap kebutuhan mereka. Lebih lanjut, peningkatan terhadap akses layanan disabilitas juga di alami oleh penduduk pribumi Australia (*aboriginal and torres strait islander people*).

Selanjutnya, Pemerintah Australia juga bekerjasama dengan NGO disabilitas dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. *Australian Federation of Disability Organisations* (AFDO) menjadi salah satu NGO yang memiliki peran signifikan dalam hal ini. AFDO melakukan *review* terhadap kebijakan NDS dan implementasi tahap pertama dan mendapatkan respon baik dari Pemerintah Australia. Kemudian, Pemerintah Australia bekerjasama dengan AFDO untuk menciptakan aplikasi dan laman website untuk memberikan informasi, mainstreaming dan sarana advokasi untuk penyandang disabilitas melalui *disability loop*. Tujuan utama dari kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia ialah untuk menciptakan keadaan serta layanan yang lebih ramah terhadap disabilitas (*disability-friendly*).

Oleh karenanya berlandaskan hal tersebut, penulis menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah ramah/friendly, karena telah memiliki kebijakan yang berskala nasional, komprehensif dan bersifat universal. Lebih lanjut, koordinasi dan kerjasama antar semua tingkatan pemerintah, NGO dan penyandang disabilitas dalam proses implementasi kebijakan menjadi tindakan yang signifikan untuk mendukung terciptanya suatu keadaan yang ramah terhadap disabilitas.